KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		=					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 1 3 2				Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 3 1 7 2 8 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : NISRINA ULFAH, AMD.KEP.							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
		ILAH PENGHASILAN		TARIF LEBIH			
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01		798.100	798.100	0	5	39.905	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 уууу							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK  C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah C.2 Nama Instansi Pemerintah	DIAM LOCAL MAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF						
C.3 ID Subunit Organisasi							
C.4 Tanggal	. 1	6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	· HAF	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
		uai dengan ketentuan yang tronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

ZYTNGFOY